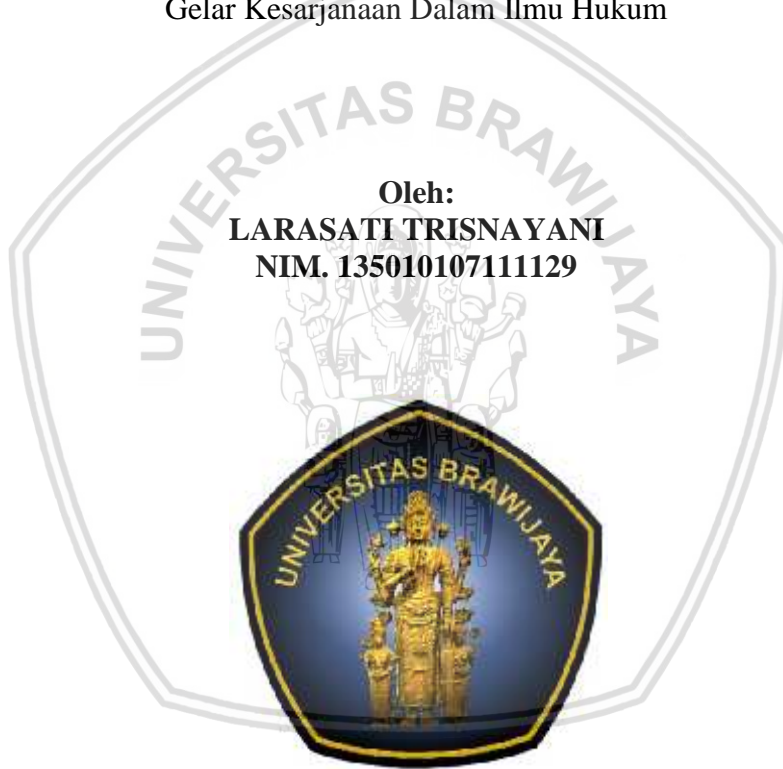


**MAKNA MELALAIKAN PADA PASAL 49 AYAT (1) HURUF A
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
LARASATI TRISNAYANI
NIM. 135010107111129



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : MAKNA MELALAIKAN PADA PASAL 49
AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (Kajian Normatif Terhadap Pasal
49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Identitas Penulis :

a. Nama : Larasati Trisnayani

b. NIM : 135010107111129

Konsentrasi : Hukum Keperdataan

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Warkum Sumitro, S.H.,M.H
NIP. 195602221984031002

M.Hamidi Masykur, S.H, M.KN.
NIP.198004192008121002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

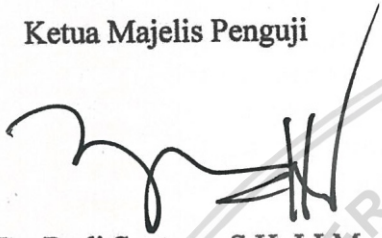
Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM.
NIP. 197206222005011002

HALAMAN PENGESAHAN
MAKNA MELALAIKAN PADA PASAL 49 AYAT (1) HURUF A
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Oleh :
LARASATI TRISNAYANI
135010107111129


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **12 SEP 2018**


Ketua Majelis Penguji


Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM.
NIP. 197206222005011002
Anggota Majelis


Fitri Hidayat, S.H., M.H.
NIK. 2012088507072001

Sekretaris Majelis Penguji


Ratih Dheviana Puru HT., S.H.,LLM.
NIP. 197907282005022001
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM.
NIP. 197206222005011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Brawijaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Warkum Sumitro, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
3. M.Hamidi Masykur,S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelayanan dan bantuan yang baik dalam kelancaran akademik.
5. Alm. Bapak Soetrisno dan Ibu Jetty Andriyani selaku orang tua penulis, atas segala curahan kasih sayang, doa, restu, nasehat dan dukungan yang tiada habisnya kepada penulis.
6. Pepeh, Odi, Bude Lina, Om Tjuk, Mbak Lilik, Tatak, Mas Rifky, Eyang, Bagas Pramanta Wicaksana selaku keluarga penulis, atas segala doa dan dukungannya kepada penulis.
7. Lekmi dan Lekjo yang selalu mendoakan, mendukung penulis dan selalu membuat kegaduhan di pagi hari.
8. Yanuar Enfika Rafani yang selalu mendukung, mengingatkan, menemani, memberikan makan, canda serta tawa dan doa kepada penulis.
9. Silvia Rara Sariratri dan Nadya Rizky Nakayo selaku teman tercinta saat SMA, yang meskipun jarang bertemu tetapi tetap saling mendoakan, menanyakan kabar, mendukung satu sama lain dan mengajak membicarakan orang lain.
10. Refita Veronica Damayanti, Sonya Dewi Angelina Putri, Resya Krisna Ayu Tjini, Salis Wulandari Fahdamir selaku sahabat penulis, yang selalu berbicara kosong tetapi selalu membantu kesusahan dalam mengerjakan skripsi walaupun sedikit.
11. Yusi Wastika Wahyudi, Imaculata Gardinta Pijar Ayudya dan Indri Sayekti selaku sahabat penulis sejak SD dan SMP yang sudah berkarir dan akan menikah, atas ajakan makan dan segala keramaian membicarakan orang lain.
12. Andika Dwi R., M.Adi Vidiensyah dan Hartono selaku sahabat penulis, atas doa, dukungan dan bimbingan dalam mengerjakan skripsi.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan untuk penulis dalam menyusun Skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Juli 2017

Penulis



RINGKASAN

Larasati Trisnayani, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2017, MAKNA MELALAIKAN PADA PASAL 49 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Warkum Sumitro,S.H.,M.H.,M.Hamidi Masykur,S.H.,M.Kn.

Orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anaknya, tetapi banyak sekali faktor hingga para orang tua melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua yang disebabkan ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Terdapat kekaburan hukum dalam kalimat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya tersebut, tidaklah dijelaskan secara rinci dan pasti mengenai pengertian dan batasan yang jelas. Kekaburan hukum diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang pencabutan kekuasaan orang tua terdapat perbedaan hakim dalam memutus perkara tentang makna melalaikan. Dengan demikian Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perkawinan belum dapat memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat Rumusan Masalah, yaitu : (1) Apa makna melalaikan yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? (2) Bagaimana kepastian hukum pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

Jenis Penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konsep dan Pendekatan Perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penelusuran yang dilakukan penulis melalui literature peraturan perundangan-undangan, studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan Interpretasi Teleologis.

Dari hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa makna melalaikan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dimaknai dengan lalai seperti dalam ketentuan perbuatan melawan hukum yang ditulis dalam Pasal 1365 jo 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan lalai dalam perbuatan melawan hukum tersebut dapat diartikan sebagai melalaikan sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu, dan bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Untuk membuktikan kalimat tersebut juga harus melalui persidangan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dengan diserahkan kepada pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta hukum dan barang bukti di persidangan. Dengan demikian Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perkawinan belum dapat memberikan kepastian hukum.

SUMMARY

Larasati Trisnayani, Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, June 2017, THE MEANING OF NEGLECT IN ARTICLE 49 PARAGRAH 1 OF SUB-PARAGRAPH (A) LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE (Normative Study to The Article 49 Paragraph (1) Sub-Paragraph (a) of Law Number 1 Year 1974 about Marriage), Warkum Sumitro,S.H., M.H., M.Hamidi Masykur,S.H.,M.Kn.

Parents have a duty to fulfill for their children, but there are so many factors that make parents neglect their duty toward their children. Article 49 Paragraph (1) Sub-Paragraph a Law Number 1 Year 1974 about Marriage regulates the revocation of the power of the parents because they neglect their duty to their child. There is a lawlessness in the sentence of neglecting their obligation to their children. It is not explained in detail and definite about its clear understanding and limitation. The lawlessness is strengthened by the decision of the High Religious Court of Surabaya Number: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby which canceled the Decision of the Religious Court of Surabaya Number: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby about the revocation of parental powers. There are different judges in deciding upon the meaning of neglect. Thus, Article 49 Paragraph (1) Sub-Paragraph a of the Marriage Law has not been able to provide legal certainty.

Based on this background, the researcher raised the Research Problems, namely: (1) What is the meaning of neglect as stated in Article 49 paragraph (1) Sub-Paragraph a Law Number 1 Year 1974 about Marriage? (2) How is the legal certainty of article 49 paragraph (1) Sub-Paragraph a Law Number 1 Year 1974 about Marriage?

The type of research used by the researcher was normative juridical. The approach method used was the Concept Approach and the Legislative Approach. The types and sources of legal materials used in the study consisted of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Tracing techniques was done by the author through the literature of legislation-legislation, literature study, and document study. Analysis techniques of legal materials used in this study was Teleological Interpretation.

From the results of the above study, it can be concluded that the meaning of neglect in Article 49 paragraph (1) Sub-Paragraph a Law Number 1 Year 1974 about Marriage may be interpreted as negligent as in the provisions of unlawful acts written in Article 1365 jo 1366 Book of Civil Law. The negligent provisions in the act against the law can be interpreted as neglecting something that violates the rights of others, contrary to the legal obligations of those who do such act, and contrary to morality, as well as the principles of social intercourse concerning the honor of others or the goods of others. To prove the sentence also must be through the trial case of the revocation of parental power by submitting to judge's consideration based on legal facts and evidence in court. Thus, Article 49 Paragraph (1) Sub-Paragraph a Law about Marriage has not been able to provide legal certainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
A. Tinjauan Umum Mengenai Konsep	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Kelalaian	14
C. Tinjauan Umum Mengenai Kepastian Hukum	15
D. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	17
E. Tinjauan Umum Mengenai Kewajiban Orang Tua.....	18
F. Tinjauan Umum Mengenai Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak.....	19
G. Tinjauan Umum Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak	21
H. Teori Kepastian Hukum	22
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	27
E. Teknik Analisis Data atau Teknik Analisa Bahan Hukum	27
F. Definisi Konseptual.....	28
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 29
A. Makna Melalaikan Dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan	29
1. Penjabaran Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan	29
2. Makna Melalaikan Dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan	30
B. Kepastian Hukum Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan	42
1. Sejarah Dibentuknya UU Perkawinan	42
2. Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan.....	52
3. Teori Kepastian Hukum	54
 BAB V PENUTUP.....	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	61
----------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Putusan PA dan PTA Surabaya	31
Tabel 1.2. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Dalil Penggugat	31
Tabel 1.3. Kepastian Hukum.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP), Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya akan disebut sebagai KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Agar kehidupan di alam dunia berkembang biak Tuhan memerintahkan perkawinan bagi makhluk ciptaannya. Tidak hanya manusia yang melaksanakan perkawinan, tetapi makhluk ciptaan Tuhan yang lain pun turut melakukannya yaitu tanaman, hewan dan tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk nyata budaya yang beraturan yang menyertai perkembangan budaya manusia dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal. Terdapat perbedaan budaya perkawinan antara masyarakat sederhana dan masyarakat maju (modern).¹ Sedangkan, pengertian perkawinan menurut UUP dijelaskan dalam Pasal 1.²

¹ Hilman Hadikusuma menyatakan dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu ikatan sakral perkawinan memiliki arti penting didalam perjalanan kehidupan manusia dikarenakan :

1. Pergaulan antara seorang pria dan wanita akan menjadi halal apabila terdapat sebuah ikatan perkawinan yang sah. Dalam hal ini terdapat kesesuaian dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang mempunyai derajat dan kehormatan.
2. Anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu keluarga hendaknya dijaga, dirawat dan dipelihara sehingga dapat tumbuh sehat secara jasmani dan rohani demi berjalannya kelangsungan hidup keluarga. Karena, hal tersebut adalah termasuk kewajiban orang tua sekaligus sebuah amanah.
3. Terbentuknya hubungan rumah tangga yang tentram, bahagia dan damai. Dalam suatu ikatan perkawinan yang tentram, bahagia, damai dan dikelilingi oleh rasa cinta kasih, kemudian akan menghadirkan sebuah suasana kehidupan masyarakat yang lebih teratur dan tertib.
4. Perkawinan merupakan salah satu perintah dari agama untuk seluruh umatnya, oleh sebab itu perkawinan merupakan suatu ibadah yang semestinya dijalankan. Dengan adanya suatu ikatan perkawinan akan mencegah dan mengurangi perbuatan maksiat serta dapat memelihara diri dari tindak perzinahan.

Dalam suatu ikatan perkawinan akan memerlukan perekat yang berfungsi untuk menyatukan dua insan. Semakin banyak perekat dalam suatu perkawinan, maka hubungan rumah tangga tersebut akan menjadi semakin kuat dan tak mudah goyah meskipun diterpa berbagai masalah. Sebaliknya, apabila perekatnya tersebut hanya secuil, maka suatu hubungan perkawinan akan sangat mudah retak

dan kemudian berakhir, ibarat hanya menunggu hitungan waktu saja.³ Apabila sebuah ikatan perkawinan sudah dianugerahi anak, selayaknyalah pasangan tersebut saling berusaha bekerjasama mempertahankan ikatan perkawinan karena anak yang sudah dianugerahkan adalah tanggung jawab mereka bersama. Karena, kehadiran anak merupakan sebuah pengikat yang paling utama dan mendasar dalam perkawinan.

Hadirnya anak mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah kehidupan perkawinan antara suami istri, karena tujuan melaksanakan salah satu perintah Tuhan yaitu perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang indah, tentram, damai dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan cinta dan kasih sayang diantara mereka.⁴ Sejalan dengan pernyataan tersebut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa:

Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

Tujuan perkawinan menurut UUP dijelaskan dalam Pasal 1.⁵ Dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga tentang tujuan

³ Prodjodikoro, Wirjono, 1981, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur, Bandung, hlm.25.

⁴ D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 1.

⁵ Tujuan Perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

perkawinan.⁶Sedangkan, didalam KUHPdata tidak ada satu pasalpun yang secara jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan tersebut.

Akan timbul akibat hukum dari adanya sebuah ikatan perkawinan.⁷Perkawinan bagi manusia bukan saja sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda seperti makhluk hidup lainnya, tetapi perkawinan juga mempunyai tujuan lain.⁸ Pergaulan laki-laki dan perempuan yang terjadi secara terhormat berdasarkan adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah akan menimbulkan persesuaian sebagai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Kehidupan rumah tangga akan semakin berwarna dengan hadirnya anak dari hasil perkawinan sah dan merupakan kunci kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat.

Selain banyak sekali pasangan yang mendambakan kehadiran sosok anak ditengah-tengah kehidupan perkawinannya, sehingga rela melakukan segala macam cara. Tak jarang juga kita temui orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Sehingga tak jarang membuat anak tersebut terlantar hingga terbuang dari lingkungan keluarganya.⁹Banyak sekali faktor hingga para orang tua melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Misalnya, anak tersebut lahir dari hubungan luar kawin yang tidak dibenarkan oleh agama dan etika masyarakat pada umumnya, perceraian antar kedua orang tua dan orang tua menikah lagi

⁶ Tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

⁷ Menurut Hilman Hadikusuma yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara suami istri dan antara mereka bersama masyarakat.

⁸ Menurut Prins yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia serta kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat didalam pergaulan masyarakat.

⁹ Yunus, Mahmud, **Hukum Perkawinan dalam Islam**, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1960, hal.31.

dengan orang lain.¹⁰Seringkali, anak dalam persoalan ini dianggap aib atau beban dalam sebuah keluarga, sehingga orangtuanya tidak segan-segan untuk membuangnya. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang membuktikan akibat hukum, karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.¹¹ Seorang anak menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya, perkawinan sah akan melahirkan anak dengan status dan kedudukan sah dihadapan hukum, sedangkan anak dari hubungan tidak sah maka anak tersebut akan memiliki status sebagai anak luar kawin.

Orang tua mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap anaknya dan hak yang dipenuhi oleh anaknya. Begitu juga dengan sang anak terhadap orang tuanya, ia memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan terhadap orang tuanya dan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Bab X UUP mengatur tentang hak beserta kewajiban orang tua dengan anaknya pada Pasal 45.¹²

Selain peraturan tentang hak serta kewajiban orang tua dengan anaknya tersebut, terdapat juga peraturan yang ikut mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang

¹⁰Hasan, Mustofa, **Pengantar Hukum Keluarga**, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.16.

¹¹ D.Y. Witanto, *Op.cit.* hlm 3.

¹² Pasal 45 UU Perkawinan tersebut adalah : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Perkawinan.¹³ Sedangkan, Pasal 48 UUP mengatur tentang harta benda sang anak.¹⁴

Berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974, dimana ketentuan pasal tersebut menyatakan :¹⁵

Ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengandung makna kekaburan, terutama mengenai kalimat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang terdapat dalam huruf a. Dalam UUP tidaklah dijelaskan secara rinci dan pasti mengenai pengertian dan batasan yang jelas.

Didalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 diatur tentang Kewajiban serta Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua.¹⁶ Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur kekuasaan orang tua

¹³ Pasal 47 UU Perkawinan tersebut adalah : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

¹⁴ Pasal 48 UU Perkawinan tersebut adalah :Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

¹⁵ (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya: Ia berkelakuan buruk sekali. (2)Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

¹⁶ Pasal 26 UU Perlindungan Anak tersebut adalah : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

terhadap anak.¹⁷ Dalam UU No. 23 Tahun 2002 juga mengatur tentang masalah kuasa asuh dan pencabutan kuasa asuh pada pasal 30, tetapi dalam pasal ini tidak dijelaskan lagi secara pasti apa yang disebut melalaikan.¹⁸

Sedangkan, yang dimaksud kewajiban orang tua pada Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 106.¹⁹

Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam kita juga tidak mendapat rujukan untuk menjelaskan kalimat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sehingga menyebabkan keaburan hukum terhadap ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a UUP.

Kekaburan hukum diperkuat oleh Putusan PTA Surabaya nomor : 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby. dimana putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Januari 2007 M. nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. Dalam putusan PTA Surabaya tersebut terdapat perbedaan pandangan dari Majelis Hakim PTA Surabaya dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, perbedaan pendapat tersebut dapat kita lihat dari putusan Putusan Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan permohonan

¹⁷ Kekuasaan orang tua adalah untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.

¹⁸ Pasal 30 UU Perlindungan Anak tersebut adalah : (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

¹⁹ Pasal 106 KHI menyebutkan : (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

pencabutan kekuasaan orang tua dengan alasan Tergugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan bermoral bejat, tidak bisa mengasuh dan mendidik anak secara Islami, Tergugat tidak memiliki sifat-sifat dan akhlak yang baik yang harus disandang oleh seorang ibu, Tergugat telah berpindah agama, dari Islam kepada agama Budha. Tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak memenuhi aturan Pasal 49 ayat (1) UUP, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Penggugat/Terbanding tidak menyebutkan dengan tegas kewajiban-kewajiban mana yang telah dilalaikan oleh Tergugat/ Pembanding terhadap anak Pembanding dan Tebanding dan kapan dilalaikannya dan Penggugat/ Terbanding tidak pula menjelaskan apakah Tergugat/ Pembanding sakit sehingga tidak mampu melakukan kewajiban terhadap anak tersebut.

Kekaburan hukum pada penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP berimplikasi pada penerapan yang tidak ada kepastian, sehingga dapat menyebabkan perbedaan pendapat antar Majelis Hakim dalam memaknai isi pasal tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membuat karya tulis yang berjudul Makna Melalaikan Pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis telah merumuskan rumusan masalah yaitu :

1. Apa makna melalaikan yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UUP ?
2. Bagaimana kepastian hukum pasal 49 ayat (1) huruf a UUP ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan merumuskan makna yang jelas terhadap kalimat melalaikan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan merumuskan kepastian hukum pasal 49 ayat (1) huruf a UUP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengenai mengenai konsep yang jelas terhadap kalimat melalaikan dan kepastian hukum penerapan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP sehingga di harapkan dapat menambah khasanah keilmuan hukum.

2. Manfaat Praktis

2.1 Manfaat Praktis Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai konsep yang jelas terhadap kalimat melalaikan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a

UUP dan kepastian hukum penerapan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP.

2.2 Manfaat Praktis Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai tambahan pengetahuan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum.

2.3 Manfaat Praktis Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah khazanah keilmuan dan bahan referensi dalam ilmu pendidikan khususnya mengenai konsep yang jelas terhadap kalimat melalaikan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP dan kepastian hukum penerapan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan untuk masyarakat.

2.4 Manfaat Praktis Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian mengenai konsep yang jelas terhadap kalimat melalaikan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP dan kepastian hukum penerapan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian tentang Konsep Melalaikan Pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai kekuasaan yang dimiliki orang tua terhadap sang anak serta pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu pembatasan terhadap ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a UUP.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Konsep

Pengertian makna menurut para ahli adalah :

1. Menurut Tjiptadi

Pengertian makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Apabila, suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata tersebut.²⁰

2. Menurut Mansoer Pateda

Pengertian makna menurut Mansoer Pateda.²¹

3. Menurut Aminuddin

Pengertian makna menurut Aminuddin.²²

4. Menurut Bloomfield

Pengertian makna menurut Bloomfield.²³

Pendapat Tjiptadi dan Bloomfield memiliki persamaan yaitu makna adalah suatu bentuk atau arti yang saling bertautan. Makna tersebut haruslah dianalisis dan dihubungkan agar kita dapat memperoleh makna dari kata tersebut.

²⁰ Tjiptadi, Bambang. 1984. **Tata Bahasa Indonesia**. Cetakan II. Jakarta: Yulistira, hlm. 19.

²¹ Mansoer Pateda menyatakan makna selalu tertanam dalam kata atau frase yang diucapkan. Merumuskan mengenai makna istilah adalah kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna selalu tertanam dalam kata atau frase yang diucapkan.

²² Aminuddin berpendapat bahwa mengenai makna hubungan antara dukungan bahasa dengan bahasa eksternal disepakati oleh pengguna sehingga dukungan bahasa yang saling dimengerti satu sama lain.

²³ Bloomfield menjelaskan mengenai bahwa makna adalah suatu bentuk bahasa yang harus dianalisis dalam batas unsur-unsur penting dari situasi di mana mengujarnya speaker.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kelalaian

Kelalaian ialah perbuatan dimana pembuatnya dengan sadar dan menyadari akan terjadinya kemungkinan akibat yang merugikan orang lain.

1. Menurut KUHPerdata

Dalam perjanjian lalai diartikan sebagai :

Terdapat dua pengertian kesalahan, yaitu :

- a. Dalam arti luas, meliputi ada unsur kesengajaan.
- b. Dalam arti sempit, hanya sebatas pada kelalaian

Didalam pasal 1247 KUH Perdata, untuk kata sengaja digunakan kata lain atau istilah yaitu arglist. Seseorang yang dengan adanya persetujuan dimungkinkan membatasi akibat yang timbul karena kelalaian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Persetujuan dianggap batal, jika bertentangan dengan nilai kesusilaan atau jika mengandung klausula yang meniadakan pertanggung jawaban atas kesengajaan yang dibuatnya sendiri berkaitan dengan persetujuan yang membatasi akibat-akibat tersebut.

Seseorang juga turut bertanggung jawab untuk menanggung perbuatan dari orang yang berada di bawah tanggungannya apabila melaksanakan sebuah perikatan. Diperbolehkan untuk membuat persetujuan yang menghapus tanggung jawab yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian dari orang yang di bawah perintahnya atau tanggungannya. Seperti apa yang diatur dalam pasal 1391 KUH Perdata.²⁴

²⁴ Pasal 1391 KUHPerdata yang berbunyi : "Seseorang yang berutang suatu barang pasti dan tertentu, dibebaskan jika ia memberikan barangnya dalam keadaan di mana barang tersebut

C. Tinjauan Umum Mengenai Kepastian Hukum

Salah satu tujuan adanya atau dibentuknya hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum yang berguna untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, baik penegak hukum maupun masyarakat dapat berpedoman pada hukum tersebut. Untuk dapat dimengerti dengan jelas, setiap istilah atau maksud dalam hukum harus dirumuskan secara terang dan tegas sehingga tidak adanya keraguan dalam memaknai dan memahami istilah dan kandungan dalam hukum tersebut. Maka, hukum harus dikembangkan secara berkelanjutan dan taat asas, demikian pula Undang-Undang harus saling kait mengkait, menuju kesatuan arah serta jangan dibuat Undang-Undang yang bertentangan.²⁵

Kepastian adalah suatu ciri yang tak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum akan kehilangan makna jika tanpa kepastian karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri merupakan salah satu tujuan dari hukum. Hukum akan kehilangan makna jika tanpa sebuah nilai kepastian karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Seorang filosof hukum Jerman yaitu, Gustav Radbruch, mengemukakan konsep terkait 3 (tiga) ide yang merupakan unsur dasar hukum, yang kemudian oleh ahli-ahli hukum diartikan sebagai tujuan dari hukum yang meliputi keadilan

berada sewaktu penyerahan, asal kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada barang tersebut, tidak disebabkan kesalahan atau kelalaiannya, maupun karena kesalahan atau kelalaian orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau pun juga karena ia sebelum timbulnya kekurangan-kekurangan itu, telah lalai menyerahkan barang itu".

²⁵ Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghina Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 73-74.

(gerechtigheid), kemanfaatan (zwechmatigheid), dan kepastian hukum (rechtmatigheid).²⁶

Berdasarkan pemaparan Gustav Radbruch diatas dapat kita lihat dengan jelas bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari dibentuk dan diterapkannya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum tersebut juga diartikan sebagai keadaan dimana hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum juga akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, demikian pula undang-undang harus saling berkaitan satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan.²⁷ Menurut Utrecht, terdapat dua pengertian dalam kepastian hukum.²⁸

Aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang mendasari ajaran kepastian hukum ini yang berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik.²⁹ Tujuan hukum bagi penganut aliran pemikiran ini.³⁰ Hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum telah mewujudkan kepastian hukum tersebut. Sifat umum aturan-aturan hukum tersebut telah menjadi bukti bahwa

²⁶ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm 83.

²⁷ *Ibid*, hlm 84.

²⁸ Terdapat dua pengertian dalam kepastian hukum, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum kemudian membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diatur boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi setiap individu dari sikap kesewenangan pemerintah karena dengan terdapat aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh Negara terhadap setiap individu.

²⁹ Yang lebih condong melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanyalah sekumpulan aturan.

³⁰ Tujuan hukum hanya sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

Perkawinan merupakan kata yang merujuk terhadap hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak istri dan suami untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.³²

1. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan didalam Pasal 1 UUP 1974 dijelaskan seperti :³³

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Didalam Pasal 2 KHI dijelaskan pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam :³⁴

3. Menurut KUHPerdara

Didalam Pasal 26 KUHPerdara diatur tentang perkawinan yaitu :³⁵

Menurut para penulis Belanda, antara lain Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

³¹Achmad Ali, *Loc.cit.*

³²Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, **Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional** (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.24.

³³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

³⁴Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³⁵Pasal 26 KUHPerdara menyatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Perkawinan adalah persekutuan antara pria dan wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.³⁶

E. Tinjauan Umum Mengenai kewajiban orang tua

1. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 45 UUP disebutkan kewajiban orangtua terhadap anaknya.³⁷

2. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 26 UU Perlindungan Anak diatur tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua.³⁸

3. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pada KHI pasal 106 diatur kewajiban orang tua.³⁹

4. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁶Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.35.

³⁷Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut berbunyi : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

³⁸Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut berbunyi : Bunyi pasal tersebut adalah : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁹Pasal 106 KHI , yaitu : (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Berdasarkan KUHPerdata (BW) diatur pada pasal 321.⁴⁰Selain itu juga diatur dalam pasal 322 KUHPerdata (BW).⁴¹

F. Tinjauan Umum Mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak

1. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang hal tersebut.⁴² Sedangkan pasal 48 mengatur kekuasaan orang tua terhadap harta benda sang anak menurut UUP.⁴³

2. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Diatur juga menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴⁴

3. Menurut KUHPerdata

⁴⁰Pasal 321 KUPerdata menyebutkan : tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas apabila mereka dalam keadaan miskin.

⁴¹Menurut pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamenantu laki-laki dan perempuan juga dalam hal-hal yang sama wajib memberi nafkah kepada mertua mereka, tetapi kewajiban ini berakhir: (1) Bila ibu mertua melangsungkan perkawinan kedua; (2) Bila suami atau istri yang menimbulkan hubungan keluarga semenda itu, dan anak-anak dan perkawinan dengan istri atau suaminya telah meninggal dunia.

⁴²Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

⁴³Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

⁴⁴Kekuasaan orang tua adalah untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.

Kekuasaan orang tua berdasarkan KUHPerdara dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Diri Anak

Kekuasaan orang tua terhadap diri anak diatur dalam pasal 298-306 KUHPerdara (BW).⁴⁵

2. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Sang Anak

Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan sang anak diatur dalam Pasal 307-319 KUHPerdara (BW). Dalam hal ini kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengurusan (het beheer) dan menikmati (vruith genot).

a) Pengurusan (het baheer)

Pengurusan harta benda anak ditujukan untuk mewakili anak melakukan suatu tindakan hukum, oleh anak karena anak dianggap tidak cakap (on bekwaam). Hak mengurus (baheer) atas harta benda anak itu.⁴⁶

b) Menikmati (het vruith genot)

Terhadap segala hasil harta kekayaan anak yang belum dewasa orang tua melakukan suatu kekuasaan orang tua atau perwalian yang mempunyai

⁴⁵Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya. Dan Pasal 298 tersebut diperkuat oleh Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana menyatakan bahwa: Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

⁴⁶Seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus (baheer) atas harta benda anak itu.

hak menikmati. Akibat hukum apabila orang tersebut diberhentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian.⁴⁷ Het vruiht genot ini diatur dalam pasal 311 KUHPerdara (BW).⁴⁸

G. Tinjauan Umum Mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

1. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam UU tersebut aturan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak termasuk dalam ketentuan Bab X mengenai Hak serta Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak. UUP menyatakan bahwa:⁴⁹

2. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang masalah kuasa asuh dan pencabutan kuasa asuh didalam pasal 30.⁵⁰

⁴⁷Apabila orang tersebut diberhentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian maka penikmatan itu beralih.

⁴⁸Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil serta kekayaan anak-anaknya belum dewasa.

Apabila baik si bapak, maupun si ibu dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau dari perwalian, maka kedua merekalah yang berhak menikmati hasil-hasil tersebut.

Pembebasan si bapak atau si ibu, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, sedangkan orang tua yang lainnya telah meninggal atau dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwaliannya, tidak mempunyai akibat-akibat terhadap hak nikmat tersebut.

⁴⁹(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatasdan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a.Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b.Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

⁵⁰Pasal 30 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan : (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3. Berdasarkan KUHPerdata

Orang tua yang melaksanakan kekuasaan orang tua dapat dicabut/ dipecat (onset) kekuasaannya tersebut apabila melakukan hal-hal yang disebut KUHPerdata (BW).⁵¹

Sebuah pencabutan mengakibatkan hilangnya hak penikmatan hasil, sedangkan pembebasan tidak menghilangkan hak menikmati hasil. Pencabutan dilakukan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga sedarah sampai derajat ke empat, Dewan Perwakilan dan Jaksa. Pembebasan hanya diminta oleh Dewan perwakilan dan Jaksa.⁵²

H. Teori Kepastian Hukum

Seorang filosof hukum Jerman yaitu, Gustav Radbruch, mengemukakan konsep terkait 3 (tiga) ide yang merupakan unsur dasar hukum, yang kemudian oleh ahli-ahli hukum diartikan sebagai tujuan dari hukum yang meliputi keadilan (gerechtigheid), kemanfaatan (zweckmatigheid), dan kepastian hukum (rechtmatigheid).⁵³

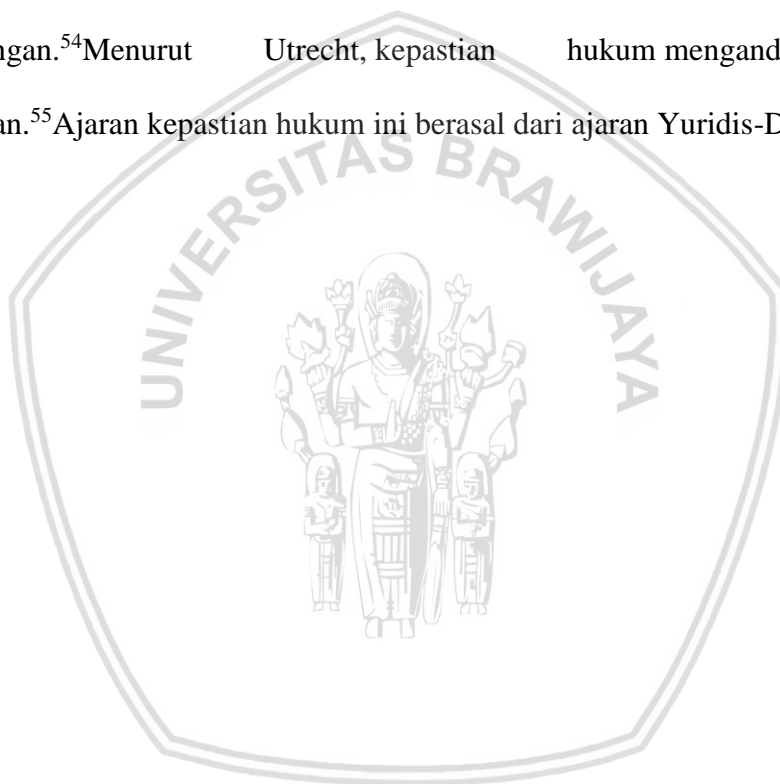
Berdasarkan pemaparan Gustav Radbruch diatas dapat kita lihat dengan jelas bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari

⁵¹Pasal 319 a ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Orang tua yang melaksanakan kekuasaan orang tua dapat dicabut/ dipecat (onset) kekuasaannya tersebut apabila melakukan hal-hal yang disebut KUHPerdata (BW) yaitu: a. Telah menyalah gunakan kekuasaan orang tuanya atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih; b. Berkelakuan buruk; c. Telah mendapat hukuman karena sengaja turut serta melakukan kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya; d.Telah mendapat hukuman karena kejahatan dalam bab. 13, 14, 15, 18, 19 dan 20 KUHP yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya; e.Telah mendapat hukuman badan 2 tahun lamanya atau lebih.

⁵²Meski orang tua masing-masing tersebut tidak dengan nyata melakukan kekuasaan orang tua asal belum kehilangan kekuasaan orang tua tersebut pencabutan terhadapnya dapat dilakukan.

⁵³Achmad Ali, *Loc.Cit.*

dibentuk dan diterapkannya hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum tersebut juga diartikan sebagai keadaan dimana hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum juga akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara berkelanjutan dan taat pada asas, demikian pula undang-undang harus saling berkaitan satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan.⁵⁴ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian.⁵⁵ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik.⁵⁶



⁵⁴ *Ibid*, hlm 84.

⁵⁵ Pertama, terdapat aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan terdapat aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

⁵⁶ Yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Sumitro, penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁵⁷ Penelitian hukum normatif ini mencakup:

- (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- (2) Penelitian terhadap sistematika hukum
- (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
- (4) Perbandingan hukum
- (5) Sejarah hukum⁵⁸

Pemilihan jenis penelitian ini memperhatikan dan melihat makna yuridis dari masih banyaknya masalah terhadap makna melalaikan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP. Yang diatur dan diberikan oleh norma hukum tertulis dan para penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia.

⁵⁷Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.86

⁵⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2013, hlm. 14

B. Pendekatan Penelitian

Yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan konsep atau conceptual approach yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.⁵⁹ Penelitian dengan pendekatan konsep ini terfokus pada makna melalaikan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP.

b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema dari penelitian ini.⁶⁰ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan UUP, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHPdata dan KHI.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Soerjono Soekanto membagi sumber badan hukum di dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu:⁶¹

a. Bahan Hukum Primer

⁵⁹Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

⁶⁰Ibid., hlm. 302.

⁶¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.* hlm. 13.

Bahan Hukum Primer disini ialah hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUP, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHPerdata dan KHI serta Putusan Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bisa membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶²Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi, wawancara dengan hakim dan penelusuran internet yang terkait dengan tema penulisan yang diambil penulis yaitu tentang Makna Melalaikan Pada Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶³Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

⁶²Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 127.

⁶³Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 114.

Sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini berasal dari:

1. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
3. Perpustakaan Umum Kota Malang
4. Situs-situs internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui literatur peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu hukum positif Indonesia. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah online. Pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan kamus cetak maupun kamus online yang tersedia di situs-situs internet.

E. Teknik Analisis Data atau Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi teleologis.⁶⁴ Metode interpretasi undang-undang diterapkan pada suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi kurang berfungsi karena tidak sesuai lagi dengan keadaan jaman. Terhadap undang-undang yang ada diupayakan (melalui penafsiran) untuk dapat digunakan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan lingkungan masa kini dengan tidak memperhatikan apakah itu pada saat diundangkannya sudah dikenal atau tidak.

⁶⁴Interpretasi teleologis yaitu cara penafsiran suatu ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan

Atau dengan kata lain interpretasi teleologis adalah menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual.

F. Definisi Konseptual

a. Makna

Pendapat Tjiptadi dan Bloomfield memiliki persamaan yaitu makna adalah suatu bentuk atau arti yang saling bertautan. Makna tersebut haruslah dianalisis dan dihubungkan agar kita dapat memperoleh makna dari kata tersebut.

b. Melalaikan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian melalaikan adalah melupakan; tidak mengindahkan; melengahkan; ~ hati menghibur hati; ~ sedih melalaikan hati; ~ tugas tidak melaksanakan tugas.

Kelalaian adalah perbuatan yang si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat merugikan orang lain.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Makna Melalaikan yang Tercantum Didalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Penjabaran Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kekuasaan orang tua terhadap sang anak dapat dikatakan berakhir.⁶⁵ Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 47 dan Pasal 49 UU Perkawinan.⁶⁶ Orang tua meskipun telah dicabut kekuasaannya tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak tersebut. Pasal 49 UU Perkawinan berbunyi sebagai berikut:⁶⁷

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan juga termasuk saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan tentang hal apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali, orang tua yang dicabut kekuasaannya tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak yang

⁶⁵Kekuasaan orang tua menurut dapat dikatakan berakhir apabila anak kawin atau sudah dapat berdiri sendiri, anak sudah dewasa (sudah genap mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan apabila salah seorang atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu, atas permintaan orang tua yang lain, keluarga dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang karena ia sangat melalaikan kewajibannya dan/atau berkelakuan buruk sekali.

⁶⁶Komariah, **Hukum Perdata Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2013, hal 57.

⁶⁷(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya: Ia berkelakuan buruk sekali. (2)Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

bersangkutan.⁶⁸ Berdasarkan uraian tersebut dapat kita lihat bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUP menjelaskan mengenai bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dapat dilakukan karena kedua atau salah satu orang tua sangat melalaikan kewajibannya kepada anak.

2. Makna Melalaikan yang Tercantum Dalam Pasal 49 ayat (1) UU

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU Perkawinan dalam Pasal 47 menguraikan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak, berkaitan dengan ketentuan tersebut, peraturan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 49 UU Perkawinan. Dapat kita ketahui bahwa alasan-alasan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak itu hanya dapat dilakukan apabila adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tua yang merugikan kepentingan anak. Kesalahan tersebut tidak sesuai dengan konsep perlindungan anak dalam ketentuan UU Perkawinan. Menurut Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya dan mereka atau salah satu diantara mereka berkelakuan buruk sekali.

Terdapat kekaburan norma dalam ketentuan pasal tersebut, dimana dalam UU Perkawinan tidaklah dijabarkan mengenai makna dari melalaikan sebagai salah satu syarat pencabutan kekuasaan orang tua tersebut. Kekaburan norma tersebut dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby. yang membatalkan Putusan PA Surabaya Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. , dimana dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya

⁶⁸Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 139.

Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak oleh penggugat, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby. Dalam tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan kabur sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara Hakim Pengadilan Agama (PA) Surabaya dan Hakim Pengadilan Tinggi (PTA) Agama Surabaya.

Tabel 1.1 Perbandingan Putusan PA dan PTA Surabaya

Nomor	Putusan Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby.	Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby.
1.	Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.	Menerina permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding.
2.	Mencabut hak hadhanah bagi Tergugat (Pembanding)	Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby.
3.	Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah.	Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima.
4.	Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 14 Mei 2001 kepada Penggugat.	Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/ Terbanding pada tingkat pertama sebesar Rp. 251.000,- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/ Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-

Sumber : Putusan Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby., diolah oleh penulis.

Tabel 1.2 Perbuatan Melawan Hukum Dalam Dalil Penggugat

Nomor	Unsur PMH	Tergugat Adalah Seorang Ibu Yang Berakhlak Tidak Baik Dan Bermoral Bejat, Tidak Bisa Mengasuh Dan Mendidik Anak Secara Islami
1.	Unsur melanggar hak orang lain	Tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan asuhan dan pendidikan (tidak mendapatkan pembiayaan ditengah pendidikannya)
2.	Unsur bertentangan dengan kewajiban hukum	Tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat untuk mengasuh dan mendidik anak

3.	Unsur bertentangan dengan kesusilaan	Tergugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan bermoral bejat
----	--------------------------------------	--

Sumber : Unsur Perbuatan Melawan Hukum.⁶⁹ Putusan Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby., diolah oleh penulis.

Berdasarkan Teori Utrecht diatas menjadi sandaran penulis untuk menganalisis apakah putusan Pengadilan Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan Putusan Nomor:78/Pdt.G/2007/Pta.Sby.sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau belum. Kekaburan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai suatu perbuatan hukum dan akibat atas dilakukannya perbuatan hukum tersebut. Peneliti, dalam penelitian ini membahas mengani tolak ukur perbuatan yang memenuhi unsur sangat melalaikan kewajibannya sebagai salah satu syarat pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perkawinan.

Ketentuan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua dalam Pasal 49 ayat (1) UUP merupakan ketentuan yang bersifat *anfullen rechts* (aturan hukum yang dapat dikesampingkan atau disimpangi apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian). Ketentuan tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut juga tidak terdapat kekosongan norma sehingga tidak perlu dilengkapi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan kekuasaan orang tua terdahulu termasuk KUH Perdata. Dengan demikian, penulis juga tidak dapat memaknai kata melalaikan dalam ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Pasal 49 ayat (1)

⁶⁹E. Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, cet.VI, Jakarta, Balai Pustaka, 1961, hal.17.

huruf a Undang-Undang Perkawinan ini dengan makna melalaikan yang terdapat dalam ketentuan wanprestasi. Karena wanprestasi berasal dari perikatan yang timbul karena perjanjian, perjanjian yaitu kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam Perikatan mana kedua pihak memiliki hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Sedangkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perkawinan ini bersumber dari suatu perikatan yang timbul karena Undang-Undang yaitu hak serta kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh Undang-Undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban Undang-Undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran Undang-Undang.

Menurut peneliti, ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum, yaitu terdapat sesuatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, dan adanya kerugian bagi korban.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan teori hubungan faktual yang merupakan salah satu teori perbuatan melawan hukum, teori hubungan faktual menyatakan bahwa sesuatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan pernah terjadi apabila sebab itu tidak ada. Dalam hal ini sepasang orang tua yang sangat melalaikan kewajibannya

⁷⁰E. Utrecht, *Op. Cit*, hal 15.

merupakan salah satu sebab dari terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan orang tua tidak akan terjadi apabila orang tua tidak melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali. Selain itu, pendapat Penulis tersebut diperkuat oleh pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn dan Hasiani Putrinta Dongoran dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn) yang menyatakan bahwa sedangkan orang tua kandung dari si anak yang dicabut kekuasaan asuh terhadap anaknya tidak bisa lagi memperoleh hak asuhnya kembali karena ia telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan itu adalah suatu merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Unsur adanya suatu perbuatan ditunjukkan dengan adanya perbuatan dari orang tua untuk melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, unsur perbuatan itu melawan hukum ditunjukkan dengan perbuatan melalaikan kewajiban tersebut melawan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, unsur adanya kesalahan dari pelaku ditunjukkan dengan perbuatan melalaikan kewajiban tersebut dilakukan oleh orang tua dan orang tua tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sedangkan unsur terakhir yaitu adanya kerugian bagi korban ditunjukkan dengan adanya kerugian dari anak yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan anak karena dilalaikannya kewajiban orang tua.

Pendapat peneliti tersebut diperkuat dengan hasil wawancara terhadap Amiryat, SH., MH.Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Lombok, yang mengatakan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut termasuk dalam

ketentuan perbuatan melawan hukum dikarenakan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak memenuhi syarat-syarat yaitu berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.⁷¹

Perbuatan melawan hukum dibedakan 3 (tiga) macam perbuatan, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁷² Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan terhadap perbuatan melawan hukum karena kelalaian, karena berdasarkan Pasal 1366 KUHPdata.⁷³ Peneliti akan menggunakan konsep lalai dalam perbuatan melawan hukum tersebut untuk memaknai lalai dalam kalimat sangat melalaikan kewajibannya sebagai salah satu syarat pencabutan kekuasaan orang tua dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perkawinan. Menurut Hoge Raad, menafsirkan ketentuan perbuatan melawan hukum dengan memperluas pengertian melakukan sesuatu dan melalaikan sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu, dan bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan yang menyangkut kehormatan orang lain atau barang orang lain.⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas orang tua dapat dikatakan melalaikan kewajibannya apabila terpenuhinya unsur-unsur melalaikan yang dijelaskan oleh

⁷¹Data Sekunder.hasil wawancara dengan Amiryat, SH., MH., 1 April 2017, Perumahan Ijen Nirwana Residence, Pk. 16.00 WIB.

⁷²Munir Fuady II, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.3.

⁷³Karena berdasarkan pasal 1366 KUHPdata yang menyatakan : Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

⁷⁴E. Utrecht, *Op.cit*, hal 17.

Hoge Raad tersebut. Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam Putusan Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. Dalil-dalil yang diberikan oleh Penggugat adalah:

- a. Tergugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan bermoral bejat, tidak bisa mengasuh dan mendidik anak secara Islami;
- b. Tergugat tidak memiliki sifat-sifat dan akhlak yang baik yang harus disandang oleh seorang ibu;
- c. Tergugat telah pindah agama, dari Islam kepada agama Budha.

Unsur-unsur melalaikan dalam teori Hoge Raad tersebut dalam dalil-dalil Penggugat dalam Putusan Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. terpenuhi dalam dalil pertama, dimana unsur melanggar hak orang lain terpenuhi dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat asuhan dan pendidikan yaitu anak tergugat didaftarkan untuk masuk sekolah tetapi saat ditengah-tengah menempuh pendidikan tergugat tidak lagi membiayai biaya sekolah sang anak, unsur bertentangan dengan kewajiban hukum terpenuhi dengan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat untuk mengasuh dan mendidik anak, dan unsur bertentangan dengan kesusilaan terpenuhi dengan Tergugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan bermoral bejat. Sedangkan dalil-dalil yang lain tidak memenuhi unsur melalaikan.⁷⁵

Orang tua dapat dikatakan sangat melalaikan kewajibannya selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan diatas juga harus dibuktikan melalui persidangan perkara pencabutan kekuasaan orang tua. Apakah orang tua dikatakan sangat melalaikan kewajibannya atau tidak itu diserahkan kepada pertimbangan Hakim,

⁷⁵E. Utrecht, *Op.cit*, hal 17.

yang harus mempertimbangkan lingkungan kehidupan atau pergaulan dari orang tua dan anak itu sendiri.⁷⁶Dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua dalam Putusan Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby. perbuatan melalaikan kewajiban tersebut dibuktikan melalui persidangan dalam tingkat pertama dan tingkat banding, ada atau tidaknya unsur melalaikan kewajiban tersebut diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan mendasarkan atas barang bukti yang diajukan oleh para pihak.

Pertimbangan Hakim dalam persidangan pencabutan kekuasaan orang tua, dapat dilakukan melalui fakta hukum dan pembuktian dalam suatu proses persidangan. Pembuktian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bukti dalam persidangan yang diakui dan sah dalam persidangan perkara perdata yaitu yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, Jenis-jenis alat bukti tersebut anatara lain sebagai berikut:

1. Alat Bukti Tulisan/ Tertulis
Pengertian alat bukti tulisan/tertulis.⁷⁷Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam alat bukti tulisan/ tertulis, yaitu akta otentik, akta bawah tangan, dan akta pengakuan sepihak.
2. Alat Bukti Saksi
Pengertian alat bukti saksi.⁷⁸Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.
3. Alat Bukti Persangkaan
Pengertian alat bukti persangkaan.⁷⁹Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah

⁷⁶Siti Inayah, **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2004, hal 68.

⁷⁷Alat bukti tulisan/tertulis adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu.

⁷⁸Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa.

⁷⁹Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya.

peristiwa yang belum terbukti. Persangkaan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim.

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Pengakuan ada 2 (dua) macam yaitu pengakuan di depan sidang dan pengakuan diluar sidang.

5. Alat Bukti Sumpah

Pengertian alat bukti sumpah.⁸⁰ Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak. Sumpah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu sumpah promissioir dan sumpah conformatoir, sumpah confirmatoir terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu sumpah supletoir, sumpah decisioir, dan sumpah aestimatoir.

Barang bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua dalam Putusan Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby. yang dipergunakan untuk memperkuat keyakinan Hakim antara lain:

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.8 serta mengadirkan 2 orang saksi, dan melampirkan pula surat persetujuan;
2. Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat;
3. Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat persetujuan dari suami Penggugat, sehingga asas persetujuan dari keluarga sebagaimana maksud Pasal 524 KUH Perdata telah terpenuhi;
4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat nama KAMHAR BIN BA'IN dan SAKSI II di bawah sumpahnya, yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;
5. Menimbang, bahwa saksi Penggugat terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, bahwa Isteri Tergugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat menyatakan bahwa anak Isteri Tergugat dan Tergugat bernama Anak I 16 tahun atau setidaknya-tidaknya kelas I SMA dan Anak II berumur 9 tahun

⁸⁰Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar.

atau setidaknya-tidaknya kelas III SD, dan dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa usia kedua anak tersebut masih dalam kekuasaan Tergugat;

8. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa selama 4 tahun, Tergugat tidak pernah mengurus anak-anak tersebut, serta tidak menjenguk dan tidak pula mengajak jalan-jalan bahkan bertemu dengan anak-anak Tergugat dan almarhumah Lini hanya dipinggir jalan;
 9. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan Tergugat suka main judi, togel yang dilihat langsung oleh saksi-saksi Penggugat;
 10. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berkelakuan buruk;
 11. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
 12. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat seorang yang miskin serta tidak memiliki harta, tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
 13. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, bahwa Tergugat tidak pernah mengurus anak-anak tersebut, serta tidak menjenguk dan tidak pula mengajak jalan-jalan, selama 4 tahun, sehingga Majelis Hakim Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor. 630/Pdt.G/2013/PA.KAG berpendapat bahwa maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 tahun 1974, telah terpenuhi;
 14. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, bahwa Tergugat berkelakuan buruk, sering mengkonsumsi narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 1 tahun 1974, telah terpenuhi;
 15. Menimbang, bahwa Tergugat terbukti sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, sehingga Majelis Hakim mengungkapkan pendapatnya bahwa Tergugat tidak mampu menunaikan kewajiban sebagaimana maksud Pasal 39 KHI dan maksud Pasal 29 UU Nomor 23 tahun 2002 UU Perlindungan Anak;
 16. Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim mengungkapkan pendapatnya bahwa unsur kedua telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 dapat dikabulkan.
- Unsur melalaikan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974

telah terpenuhi berdasarkan fakta yuridis poin ke 13 yaitu :

1. Tergugat tidak pernah mengurus anak-anak tersebut;
2. serta tidak menjenguk; dan
3. tidak pula mengajak jalan-jalan selama 4 tahun.

Syarat formil suatu alat bukti sehingga alat bukti tersebut dapat dikatakan sah dalam suatu persidangan perkara perdata, yaitu orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata dan Pasal 145 Jo. Pasal 172 HIR, memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata dan Pasal 144 HIR, serta mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinannya berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR. Selain syarat formil terdapat juga syarat materiil suatu alat bukti sehingga alat bukti tersebut dapat dikatakan sah dalam persidangan perkara perdata.

Syarat materiil tersebut antara lain adalah keterangan-keterangan yang diberikan didukung alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR.⁸¹

Proses persidangan suatu perkara pencabutan kekuasaan orang tua di pengadilan haruslah diawali dengan suatu permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, dimana pengaturan mengenai permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) UUP. Dalam Pasal 49 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dimintakan oleh orang tua yang lain.

Pihak yang melakukan permohonan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dalam Putusan Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby dan Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby. dilakukan oleh Penggugat (ayah) yang menggugat

⁸¹Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR, keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain atau dengan alat bukti yang lainnya berdasarkan Pasal 1906 KUH Perdata (BW) dan Pasal 170 HIR.

Tergugat (ibu / istri Penggugat) dengan dalil bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan bermoral bejat, tidak bisa mengasuh dan mendidik anak secara Islami, Tergugat tidak memiliki sifat-sifat dan akhlak yang baik yang harus disandang oleh seorang ibu, dan Tergugat telah pindah agama, dari Islam ke agama Budha.

Berdasarkan terpenuhinya unsur melalaikan dalam teori Hoge Raad maupun unsur melalaikan dalam perbuatan melawan hukum secara umum yang telah dijabarkan diatas, dengan demikian peneliti berpendapat bahwa kalimat sangat melalaikan kewajibannya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Tentang Perkawinan tersebut dapat dimaknai dengan lalai seperti dalam ketentuan perbuatan melawan hukum.⁸² Dimana ketentuan lalai dalam perbuatan melawan hukum tersebut dapat diartikan sebagai melalaikan sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan tersebut, dan bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan yang menyangkut tentang kehormatan orang lain atau barang orang lain. Selain itu, perbuatan orang tua yang sangat melalaikan kewajibannya tersebut juga harus dibuktikan melalui persidangan perkara pencabutan kekuasaan orang tua. Apakah orang tua dikatakan sangat melalaikan kewajibannya atau tidak itu diserahkan kepada pertimbangan Hakim, yang haruslah didasarkan atas fakta-fakta hukum dan barang bukti di persidangan perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

⁸²E. Utrecht, *Op.cit*, hal 17.

B. Kepastian Hukum Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Sejarah Dibentuknya UU Perkawinan

Negara Indonesia adalah negara pluralistis yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralistis artinya banyak macam; bersifat majemuk: di Indonesia masyarakatnya serba-, jadi dapat diartikan bahwa Indonesia ialah suatu wilayah yang didalamnya terdapat berbagai macam penduduk atau kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai kultur, agama, suku, sosial dan lain sebagainya. Walaupun begitu, Negara Indonesia yang pluralistis ini tetap memegang teguh semboyan Bhineka Tunggal Ika yang maknanya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan memegang semboyan tersebut, bukan berarti dalam prakteknya sesuai dengan apa yang dikehendaki dan tak bisa dipungkiri bahwa Negara Indonesia dengan masyarakatnya yang plural ini tentu mempunyai pandangan dan cara berpikir yang berbeda pula yang tak mudah untuk bisa dipesatukan menjadi satu pemikiran termasuk salah satunya ialah mengenai perbedaan terhadap pandangan hukum di Indonesia. Persoalan pluralisme dan dualisme hukum nyata masih dipengaruhi dengan kuatnya tingkat ketergantungan pada produk hukum yang bisa dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mengadopsi hukum warisan penjajah Belanda.⁸³ Konsekuensi dari sikap ini dibuktikan dengan terjadinya pengelompokan hukum (1) adanya kelompok pembela hukum adat, (2) kelompok pembela hukum Islam, dan (3) kelompok pembela warisan hukum Belanda.⁸⁴ Berakhirnya masa penjajahan Belanda ternyata tidak serta merta juga

⁸³H. Wasman, M. Ag dan Wardah Nuroniyah, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif**, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁸⁴*Ibid*, hlm. 1-2.

terhenti produk hukum yang diciptakannya dahulu, melainkan oleh negara Indonesia yang mejemuk ini produk-produk hukum Belanda tersebut masih tetap digunakan dengan berdampingan dengan hukum adat dan hukum (agama) Islam.

Indonesia mempunyai konsep negara hukum dimana menurut Oemar Seno Hadji, negara hukum Indonesia bukan berciri-ciri dari konsep negara hukum Eropa Kontinental melainkan memiliki ciri-ciri khas Indonesia sendiri. Pancasila adalah ciri khas dari Indonesia sehingga Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum (dinamakan negara hukum Pancasila). Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama yang berkonotasi positif dengan tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Indonesia, selain itu ciri lain dari negara hukum Indonesia adalah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara, karena keduanya berada dalam hubungan yang harmonis.⁸⁵ Selain pendapat Oemar Seno Adji, terdapat pula pendapat dari Padmo Wahyono yang menelaah negara hukum Pancasila ialah bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dimana diutamakan adalah rakyat banyak namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai sesuai pula yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Padmo Wahyono juga menegaskan ada tiga fungsi hukum dilihat dari cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan yaitu: (1) menegakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuan pokok sistem pemerintahan negara dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945; (2) mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945; dan (3) menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan

⁸⁵ Afdol, **Landasan Hukum Positif Pemberlakuan HUKUM ISLAM & Permasalahan Implementasi Kewarisan Islam**, Yuridika, Surabaya, 2001, hlm. 44.

dilaksanakan secara adil dan beradab.⁸⁶Konsep Negara Indonesia yang lekat dengan negara hukum dan negara kesatuan mendorong para pemimpin Indonesia yang pada saat itu, saat awal kemerdekaan untuk berusaha agar terdapat unifikasi hukum yang pasti dan pas untuk semangat dan jiwa bangsa Indonesia sekaligus ingin menyingkirkan warisan penjajah Belanda terutama produk-produk hukumnya. Para pemimpin Indonesia pada saat itu rupanya ingin menjunjung tinggi konsep negara Indonesia yang sebenarnya yakni yang berlandaskan pada Pancasila bukan produk hukum yang ditinggalkan oleh penjajah pada saat itu. Tentu usaha unifikasi hukum pada masa awal kemerdekaan bukan perkara mudah karena bangsa Indonesia masih erat hubungannya dengan kepercayaan agama dan kultur atau adat masyarakat. Namun lambat laun dengan semangat para pemimpin, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengusahakan proses unifikasi hukum yang mengarah kepada modernisasi.⁸⁷Berkaitan dengan hal tersebut, dijelaskan dalam GBHN Tap. No. II/MPR/ 1983 di bidang hukum, bahwa pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat :

- a. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai
- b. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berdasarkan pada prinsip keadilan
- c. Lebih memberikan dukungan dan pengamanan pada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran

⁸⁶ Padmo Wahyono, **Beberapa Teori Ketatanegaraan Prof. Djoko Soetono, S.H.**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 5-6.

⁸⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Op.Cit*, hlm 3.

Agar tercapai 3 poin diatas maka dalam pembangunan dan pembinaan hukum nasional mempunyai kewajiban antara lain: pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.⁸⁸

Produk unifikasi hukum di Indonesia salah satunya ialah lahirnya UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pada tanggal 12 Januari 1974 pada Lembaran Negara Nomor 1/1974 yang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975. Dibentuknya UU RI Nomor 1 Tahun 1974 ini bermaksud untuk lebih mengakomodir aspirasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang perkawinan yang bercorak Indonesia terutama pada saat itu mengakomodir tuntutan masyarakat khususnya harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan yang dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928. Perbaikan yang didambakan itu terutama bagi golongan Indonesia Asli atau pribumi yang beragama Islam dimana hak serta kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis, hal ini dikarenakan hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, menurut sistem hukum Indonesia tidak dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintah.⁸⁹ Dengan keadaan seperti itulah dirasa kedudukan perempuan dalam perkawinan menjadi tidak pasti sehingga secara bersamaan pula berdampak pada ketidakpastian hukum sekaligus kurangnya perlindungan hukum pada perempuan dalam perkawinan pada masa

⁸⁸*Ibid*, hlm. 4.

⁸⁹Erfaniah Zuhriah, **Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama**, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 82.

itu. Permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam pergerakan wanita pada masa itu adalah:

- a. Perkawinan Paksa;
- b. Poligami;
- c. Talak yang sewenang-wenang.

Setelah Indonesia merdeka pada saat itu, pemerintah mengadakan langkah-langkah perbaikan antara lain mengeluarkan Undang-undang tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk Tahun 1946 yang disusul dengan Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara pasit nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama. Walaupun telah dilakukan langkah tersebut, ternyata belum memenuhi kebutuhan masyarakat karena Undang-undang dan peraturan-peraturan itu hanyalah mengenai formil belaka dan tidak ada mengenai hukum materiilnya yakni berupa Undang-undang yang khusus mengatur mengenai perkawinan itu sendiri.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memang tidak mempunyai Undang-undang Perkawinan buatan khas Indonesia sendiri sebagaimana yang diamatkan konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan perkawinan di Indonesia masih mengacu pada perundang-undangan perkawinan buatan Belanda.⁹⁰ Mengenai perkawinan bagi masyarakat di wilayah Indonesia yang masih mengacu pada produk hukum buatan Belanda ini sebenarnya semata-mata hanya sebagai sarana sementara untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang perkawinan pada masa itu. Pemberlakuan

⁹⁰Seomiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan**, cetakan ke-4, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 2-3.

hukum kolonial Belanda dalam bidang perkawinan ini didasari oleh UUUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) Tahun 1949 Pasal 192 ayat (1), Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 Pasal 142, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan masih diberlakukannya hukum Belanda di bidang perkawinan tersebut, otomatis juga masih diberlakukannya pembagian golongan penduduk yang pada saat itu bersinggungan dengan kemajemukan suku dan agama yang menghasilkan kategori sebagai berikut :⁹¹

- a. Hukum perkawinan bagi Golongan Eropa dan Golongan Timur Asing Keturunan Cina, berlaku buku I, Titel IV sampai dengan Titel XI IBW
- b. Hukum Perkawinan bagi Golongan Pribumi dan Golongan Timur Asing pemeluk Agama Islam, berlaku asas-asas yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist Nabi Muhammad SAW.
- c. Hukum Perkawinan bagi Golongan Pribumi Pemeluk Agama Kristen, berlaku Huwelisk Ordonantie Christen Inlandders (HOCI/S.1933 No.74)
- d. Hukum Perkawinan bagi Golongan bukan pemeluk Agama Islam maupun Kristen, berlaku asas-asas yang bersumber dari hukum adat masing-masing
- e. Hukum Perkawinan bagi Golongan yang melangsungkan Perkawinan Campuran, berlaku Reglement Gemengde Huwelijk (RGH).⁹²

Selain dari kategori yang disebutkan diatas, tentu masih ada golongan-golongan lain khususnya agama-agama lain dan kepercayaannya masing-masing

⁹¹Wila Chandrawila Supriadi, **Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda**, Mandar Manju, Bandung, 2002, hlm. 64.

⁹²Yang dimaksud perkawinan campuran pada masa itu adalah perkawinan di wilayah Indonesia yang dilangsungkan oleh dua orang yakni laki-laki dan perempuan yang mana keduanya tunduk pada hukumnya masing-masing.

bangsa Indonesia. Dibentuknya UU Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini hendak diusahakan adanya hukum Negara Indonesia yang ditetapkan oleh yang berwajib yang sinkron dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga diharapkan ke depannya tidak ada dualisme sosial dalam melakukan perkawinan serta menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Usaha unifikasi di bidang perkawinan ini telah dimulai puluhan tahun yang lalu.⁹³Awalnya terdapat gerakan perjuangan wanita 1928, yang kemudian baru sejak tahun 1950 Pemerintah RI menugaskan kepada Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk untuk meninjau kembali segala peraturan mengenai Perkawinan dan menyusun Rancangan Undang-undang yang selaras dengan perkembangan dan dinamikanya. Panitia yang dibentuk tersebut membuat dua buah Rancangan Undang-undang Perkawinan, yaitu Rancangan Undang-undang Perkawinan Umum yang diselesaikan tahun 1952 dan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam yang diselesaikan tahun 1954.⁹⁴Rancangan Undang-undang tersebut dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1958 – 1960 tapi tidak berhasil berwujud Undang-undang.⁹⁵ Adanya Undang-undang perkawinan ini telah pula menjadi pemikiran yang dikemukakan pada Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga pada tahun 1960 yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial, kemudian pada Konferensi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP.4) Pusat tahun 1962 yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Pada tanggal 22 Mei Tahun 1967, Pemerintah telah menyampaikan suatu

⁹³Achmad Ichsan, **Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.19.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 20.

⁹⁵ Erfaniah Zuhriah, *Op.Cit*, hlm. 82.

Rancangan Undang-undang tentang Peraturan Pernikahan untuk Islam yang dibicarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) bersama-sama dengan Rancangan UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dalam bulan Oktober 1968 yang mana Departemen Kehakiman telah menugaskan kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional mengenai penyusunan penyusunan Rancangan Undang-undang Perkawinan yang bersiat Nasional dengan landasan jiwa Pancasila yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) pada tanggal 7 September 1968 dalam bentuk Rancangan UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan.⁹⁶ Tapi sayangnya, kedua Rancangan Undang-undang tersebut belum sempat diselesaikan.

Tahun 1973, dengan amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/PU/VII/1973 kembali mengajukan Rancangan Undang-undang tersebut kepada DPR yang terdiri dari 15 Bab dan 73 Pasal. Bab-bab tersebut meliputi:⁹⁷

- I. Dasar-dasar Perkawinan
- II. Syarat-syarat Perkawinan
- III. Pertunangan
- IV. Tata cara Perkawinan
- V. Batalnya perkawinan
- VI. Perjanjian Perkawinan
- VII. Hak serta Kewajiban Suami Istri

⁹⁶ Achmad Ichsan, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁹⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Op.Cit*, hlm. 14.

- VIII. Harta Benda dalam Perkawinan
- IX. Putusnya Perkawinan dan akibatnya
- X. Kedudukan Anak
- XI. Hak serta Kewajiban antara Anak dan Orang Tua
- XII. Perwalian
- XIII. Ketentuan-ketentuan lain

setelah mendapat tanggapan pro dan kontra akhirnya dicapai satu konsensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya sehingga tercapai kata mufakat di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁹⁸ Akhirnya setelah melalui pembicaraan-pembicaraan yang banyak menarik perhatian baik di dalam forum Dewan Perwakilan rakyat maupun di luar forum Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu perdebatan di luar forum Dewan Perwakilan Rakyat ialah timbulnya reaksi keras pro dan kontra dari segala lapisan masyarakat muslim, khutbah di Masjid-masjid, ceramah, pengajian, tulisan di mass media, demonstrasi dan berbagai pernyataan sikap dari ormas-ormas Islam yang pada intinya menolak Rancangan Undang-undang Tentang Perkawinan tersebut, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan digambarkan oleh Kamal Hassan, semua ulama, baik dari kalangan tradisional maupun reformis, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Surabaya Jawa Timur semua menolak Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan ini.⁹⁹ Reaksi ini memuncak pada bulan September 1973 yakni ketika 335 orang datang dan masuk ke dalam ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan mengacaukan jalannya sidang serta menguasai perdebatan, dan peristiwa tersebut tercetus suatu kompromi undang-undang yang kemudian diterima oleh

⁹⁸Erfaniah Zuhriah, *Op.Cit*, hlm. 83.

⁹⁹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Op.Cit*, hlm. 15.

Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 Desember 1973.¹⁰⁰Selanjutnya dari berbagai pertentangan itu, yang sempat terjadi lobbying antara fraksi-fraksi dan Pemerintah, maka bertepatan pada hari bersejarah bagi kaum wanita yaitu hari Ibu pada tanggal 22 Desember 1973, Rancangan Undang-undang Perkawinan itu telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tanggal 2 Januari 1974, Indonesia memiliki Undang-undang Perkawinan setelah ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara yang kemudian terkenal dengan Undang-undang Nomor 1/1974 (Lembaran Negara No. 1 tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019. Undang-undang tersebut terdiri dari 14 Bab yang terbagi dalam 6 Pasal. Bab-bab itu terdiri sebagai berikut:

- I. Dasar Perkawinan
- II. Syarat-syarat Perkawinan
- III. Pencegahan Perkawinan
- IV. Batalnya Perkawinan
- V. Perjanjian Perkawinan
- VI. Hak serta Kewajiban Suami Istri
- VII. Harta Benda dalam Perkawinan
- VIII. Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
- IX. Kedudukan Anak
- X. Hak serta Kewajiban antara Anak dan Orang Tua
- XI. Perwalian
- XII. Ketentuan-ketentuan lain

¹⁰⁰ Mark Cammark, **Hukum Islam dan Politik di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya**, Mizan, Bandung, 1993, hlm. 28.

XIII. Ketentuan Peralihan

XIV. Ketentuan Penutup

Setelah itu barulah pada tanggal 1 April 1975 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

2. Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan

UU Perkawinan salah satunya mengatur mengenai hak serta kewajiban antara orang tua dan anaknya yang diatur dalam Bab X khususnya Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UUP. Dalam ketentuan Bab X mengenai hak serta kewajiban antara orang tua dan anaknya tersebut diatur pula mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) UUP.¹⁰¹

Kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dicabut apabila orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya dan berkelakuan sangat buruk sekali. Pencabutan kekuasaan orang tua tersebut dapat dilakukan atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan suatu keputusan pengadilan. Orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak mereka, masih tetap mempunyai kewajiban

¹⁰¹Pasal 47 yang berbunyi: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

memberi biaya pemeliharaan kepada anak yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:¹⁰²

Ketentuan dalam UU Perkawinan sebagai unifikasi aturan-aturan dalam hukum perkawinan tersebut terdapat beberapa pasal yang mengandung kekaburan hukum sehingga menyebabkan hukum tersebut tidak jelas atau multi tafsir. Salah satunya adalah ketentuan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua khususnya yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UUP, dimana dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan dengan terperinci mengenai makna melalaikan sebagaimana telah dijelaskan oleh peneiti dalam pembahasan huruf A diatas. Ketentuan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak dalam UU Perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *anfullen rechts* (aturan hukum yang dapat dikesampingkan atau disimpangi apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian). Ketentuan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak dalam UU Perkawinan tersebut juga tidak mengalami kekosongan hukum sehingga tidak perlu untuk menggunakan aturan-aturan hukum perkawinan lama untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Permasalahan lain yang muncul dengan adanya kekaburan aturan (norma) dalam ketentuan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua khususnya yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Tentang Perkawinan adalah mengenai kepastian hukum terhadap masyarakat. Sebagai salah satu tujuan dibentuknya

¹⁰² (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

hukum, sudah selayaknya UU Perkawinan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk memebuhi salah satu tujuan dibentuknya hukum tersebut, akan tetapi dengan adanya kekaburan hukum terhadap atauran pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Tentang Perkawinan yang bersifat anfullenrecht tersebut masih belum jelas apakah kepastian hukum tersebut juga dapat dipenuhi atau tidak, dalam penjabaran rumusan masalah kedua ini peneliti akan menganalisis dan menjabarkan mengenai permasalahan kepastian hukum dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan.

3. Teori Kepastian Hukum

Seorang filosof hukum Jerman yaitu, Gustav Radbruch, mengemukakan konsep terkait 3 (tiga) ide yang merupakan unsur dasar hukum, yang kemudian oleh ahli-ahli hukum diartikan sebagai tujuan dari hukum yang meliputi keadilan (gerectigheid), kemanfaatan (zwechmatigheid), dan kepastian hukum (rechtmatigheid).¹⁰³

Berdasarkan pemaparan Gustav Radbruch diatas dapat kita lihat dengan jelas bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dari dibentuk dan diterapkannya hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum tersebut juga diartikan sebagai keadaan dimana hukum dibentuk bagi masyarakat dalam negara secara terang, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum juga akan tercapai ketika hukum tersebut dikembangkan secara

¹⁰³ Achmad Ali, *Loc.cit.*

berkelanjutan dan taat pada asas, demikian pula undang-undang harus saling berkaitan satu sama lain, menuju kearah persatuan yang tidak saling bertentangan.¹⁰⁴ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian.¹⁰⁵ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik.¹⁰⁶

Berdasarkan Teori Gustav dan Utrecht diatas menjadi sandaran penulis untuk menganalisis apakah Pasal 49 ayat (1) huruf a sudah berkepastian hukum atau belum. Maka penulis akan menjabarkan tentang analisis dalam table sebagai berikut :


Tabel 1.3Kepastian Hukum

Nomor	Unsur Kepastian Hukum	Unsur Ketidakpastian penerapan dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan	Unsur Kepastian penerapan dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan
1.	Peraturan yang terang	Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Tentang Perkawinan memiliki kekaburan hukum khususnya mengenai konsep melalaikan, karena tidak ada penjelasan baik di naskah akademik maupun di peraturan	

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 84.

¹⁰⁵ Pertama, terdapat aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan terdapat aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

¹⁰⁶ Yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian.

		pelaksana.	
2.	Peraturan yang tegas		Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Tentang Perkawinan memiliki ketentuan yang tegas, yang dibuktikan dengan adanya sanksi pencabutan kekuasaan orang tua terhadap para pihak yang melanggarnya.
3.	Peraturan yang tidak menimbulkan keraguan	Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Tentang Perkawinan dapat menimbulkan keraguan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pasal tersebut karena memiliki kekaburan hukum mengenai makna melalaikan.	
4.	Peraturan yang taat kepada asas dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya		Pasal 49 Ayat (1) huruf a UUP memiliki kesesuaian dengan peraturan yang lain sebagai contoh kewajiban dari orang tua yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) UU Tentang Perkawinan juga diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).
5.	Peraturan yang berisikan perbuatan yang boleh maupun tak boleh dilakukan serta melindungi individu dari kesewenang pemerintah		Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Tentang Perkawinan mengatur dengan jelas bahwa orang tua tak dibolehkan untuk sangat melalaikan kewajibannya dengan hukuman yaitu pencabutan kekuasaan orang tua.
6.	Hukum yang bersifat umum		Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Tentang Perkawinan merupakan ketentuan yang bersifat umum, dikarenakan ketentuan tersebut berlaku

			untuk setiap orang tua tanpa mengecualikan dengan suatu kriteria tertentu.
--	--	--	--

Sumber : Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan, dihubungkan dengan wawancara yang menyampaikan tidak ada kepastian hukum.

Tabel diatas menguraikan mengenai kesesuaian antara unsur kepastian hukum yang terdapat dalam teori kepastian hukum dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan. Berdasarkan uraian yang dijabarkan penulis dalam tabel diatas dapat kita ketahui bahwa masih terdapat beberapa unsur kepastian hukum yang belum terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan, unsur-unsur tersebut antara lain adalah peraturan yang terang dan peraturan yang tidak menimbulkan keraguan. Sedangkan unsur-unsur yang lain berupa peraturan yang tegas, peraturan yang taat kepada asas dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya, peraturan yang berisikan perbuatan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan serta melindungi individu dari kesewenang pemerintah, dan peraturan yang bersifat umum sudah terpenuhi dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa masih terdapat unsur kepastian hukum yang tidak terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perkawinan belum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna melalaikan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimaknai dengan lalai seperti dalam ketentuan perbuatan melawan hukum yang ditulis dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana ketentuan lalai dalam perbuatan melawan hukum tersebut dapat diartikan sebagai melalaikan sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu, dan bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Selain itu, perbuatan lalai tersebut juga harus dibuktikan melalui persidangan perkara pencabutan kekuasaan orang tua.
2. Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Tentang Perkawinan belum dapat memberikan kepastian hukum. Hal tersebut dapat di lihat dari, hanya dapat memenuhi 4 (empat) unsur saja sedangkan 2 (dua) unsur yang lain masih belum terpenuhi. Kedua unsur tersebut tidak memenuhi sebagaimana teori Gustav Radbruch antara lain adalah peraturan yang terang dan peraturan yang tidak menimbulkan keraguan. Sedangkan unsur-unsur yang lain berupa peraturan yang tegas, peraturan yang taat kepada asas dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya, peraturan yang berisikan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta melindungi individu dari kesewenang pemerintah, dan peraturan yang bersifat umum sudah terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi hakim, Hakim harus teliti dalam membuat putusan terhadap suatu perkara pencabutan kekuasaan orang tua, dengan mencermati serta mempelajari fakta-fakta hukum dan barang bukti dalam persidangan perkara pencabutan kekuasaan orang tua, sehingga Hakim dapat membuktikan dengan tepat terpenuhi atau tidaknya syarat pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam Pasal 49 ayat (1)huruf a UU Perkawinanya itu orang tua sangat melalaikan kewajibannya, sehingga dalam putusannya hakim dapat lebih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Bagi peneliti berikutnya, peneliti berikutnya dapat mengkaji permasalahan lain dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perkawinan, dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat pencabutan kekuasaan orang tua adalah orang tua sangat melalaikan kewajibannya,namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan mengenai berapa kali batasan orang tua orang tua dapat melalaikan kewajiban sehingga dikatakan sangat melalaikan kewajibannya, karena kalimat sangat secara tidak langsung menyatakan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari sekali, sehingga terdapat kekaburan hukum dalam ketentuan pasal tersebut. Dan peneliti berikutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar dan acuan untuk melakukan penelitian.
3. Bagi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan pembaruan terhadap ketentuan kekuasaan orang tua terhadap anak dengan memberikan penjelasan lebih mengenai kekuasaan orang tua dalam UU Perkawinan.

Presiden juga dapat membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang berisikan tentang ketentuan lebih lanjut pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Achmad Ali. 2002. **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**. PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Jakarta.
- Achmad Ihsan. 1986. **Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam. Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum**. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Afdol. 2001. **Landasan Hukum Positif Pemberlakuan HUKUM ISLAM & Permasalahan Implementasi Kewarisan Islam**. Yuridika. Surabaya.
- Amiryat. 2017. **Data Sekunder Hasil Wawancara**. (L. Trisnayani, Interviewer).
- Bahder Johan Nasution. 2008. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Mandar Maju. Bandung.
- Bambang Sunggono. 2012. **Metode Penelitian Hukum**. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- D.Y. Witanto. 2012. **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan**. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Djamarah, S. B. 2008. **Psikologi Belajar**. Rineka Cipta. Jakarta.
- E. Utrecht. 1961. **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**. Jakarta.
- Erfaniah Zuhriah. 2014. **Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama**. Setara Press. Malang.
- Hilman Hadikusuma. 1977. **Hukum Perkawinan Adat**. Alumni. Bandung.

- Hilman Hadikusuma. 2007. **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar. 2013. **Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional**. Kencana Prenadamadia Group. Jakarta
- Jhony Ibrahim. 2007. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia Publishing. Malang.
- Koentjaraningrat. 1997. **Metode-Metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Komariah. 2013. **Hukum Perdata**. UMM PRESS. Malang.
- Komariah. 2013. **Hukum Perdata Edisi Revisi**. UMM Press. Malang.
- Mahmud Yunus. 1960. **Hukum Perkawinan dalam Islam**. Pustaka Mahmudiah. Jakarta.
- Mark Cammark. 1993. **Hukum Islam dan Politik di Asia Tenggara, Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya**. Mizan. Bandung.
- M. Isnaeni. 2016. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Refika Aditama. Bandung.
- M.. Singarimbun & E. Sofian. 2009. **Metode Penelitian Survei**. LP3ES. Jakarta.
- Munir Fuady II. 2002. **Perbuatan Melawan Hukum**. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muslan Abdurrahman. 2009. **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**. UMM Press. Malang.
- Mustofa Hasan. 2011. **Pengantar Hukum Keluarga**. Pustaka Setia. Bandung.

- Padmo Wahyono. 1984. **Beberapa Teori Ketatanegaraan Prof. Djoko Soetono, S.H.** Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Prins. 1982. **Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.** Ghalian Ind. Jakarta Timur.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1988. **Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.** Airlangga University Press. Surabaya.
- R. Syahrani. 1999. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.** Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Seomiyati. 1999. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cetakan ke-4.** Liberty. Yogyakarta.
- Siti Inayah. 2004. **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak).** 68.
- Soerjono Soekanto. 2012. **Pengantar Penelitian Hukum.** UI Press. Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat.** RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Subekti. 2003. **Pokok-Pokok Hukum Perdata.** PT. Intermasa. Jakarta.
- Umar & Husein. 2004. **Metode Riset Ilmu Administrasi.** Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wasman & Wardah Nuronyah. 2011. **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif.** Teras. Yogyakarta.
- Wijono Prodjodikoro. (1981). **Hukum Perkawinan di Indonesia.** Sumur. Bandung.

Wila Chandrawila Supriadi. 2002. **Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda.**

Mandar Maju. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Abdurrahman. 1992. **Kompilasi Hukum Islam.** Akademia Presindo. Jakarta

Subekti. 1960. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Pradnya Paramita.

Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2012). Citra

Umbara. Bandung.

